PONTIANAK POST

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nop | Des | 2016 | Hal. : 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

# Kalbar Butuh Cepat Vaksin Rabies

**PONTIANAK**—Kementerian Kesehatan pada dasarnya bisa menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan. Kerjasama itu dilakukan dalam penunjukkan langsung (PL) pembelian vaksin rabies ke pabrik pembuatnya hingga penyalurannya kepada daerah yang membutuhkan.

Anggota Komisi IX DPR RI Karolin Margret Natasa menilai saran itu perlu dilakukan agar penyaluran vaksin pada daerah yang berstatuskan kejadian luar biasa untuk kasus rabies bisa cepat.

Selain itu, ada pengawasan yang dilakukan baik itu oleh BPK maupun KPK. Mulai dari permintaan hingga sampai ke rumah sakit dan puskesmas.

**Jadi terpantau dengan baik dan ada transparansi data. Vaksin pun bisa sampai tepat sasaran.**

"Jadi terpantau dengan baik dan ada transparansi data. Vaksin pun bisa sampai tepat sasaran," jelas Karolin di Pontianak, Senin.

Oleh karena itulah, jelas dia, Kementerian Kesehatan bisa meminta pendampingan dari BPK dan KPK karena mengingat ada status KLB di Kalimantan Barat. "Sekarang proses tender harus diumumkan, penawaran baru diputuskan pemenang.

Ini bisa memakan waktu tiga bulan. Tetapi dengan penunjukan langsung Kemenkes bisa minta pendampingan KPK dan BPK," kata dia.

Menurutnya lagi, rentang waktu itu baru sampai pada keputusan pemenang tender tersebut. Belum lagi waktu yang dibutuhkan untuk penyaluran vaksin. Apalagi vaksin yang disalurkan di Indonesia itu harus dibeli di Perancis. Melihat runtutan waktu itu, sebut Karoline, bisa memakan waktu empat bulan. Termasuklah sampai ke Kalimantan Barat yang kasus rabiesnya dinyatakan kejadian luar biasa. "Termasuk yang disalurkan ke Kalbar. Oleh Kemenkes, sudah dianggarkan sejak tahun lalu dan merupakan buffer stock. Akibatnya Kalbar rebutan vaksin dengan daerah lain yang berstatus endemik rabies," tuturnya.

Sementara itu saat peringatan hari rabies sedunia di Pontianak, mendapatkan bantuan 25.000 dosis vaksin rabies, kulkas 10 unit, coolbox 10 unit dan 82 vial vaksin antirabies. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek. Tercatat ada delapan kabupaten Kalbar yang menjadi wilayah endemik rabies. Sejak Januari hingga September 2016 sudah ada 921 kasus gigitan rabies. Dari jumlah itu sudah sembilan orang meninggal dunia. Kalbar juga memiliki stok vaksin untuk hewan sebanyak 69.000. sebanyak 46.000 sudah disalurkan ke daerah yang ditetapkan sebagai daerah KLB.

Kepala Dinas Kesehatan Andy Jap menyebutkan jika daerah dinyatakan KLB maka penanganannya secara medis bisa diambil pemerintah dengan menggunana dana darurat.

"Dana itu bersumber dari pengelolaan dana tidak terduga seperti bencana. Dan bisa dipakai untuk KLB. Daerah menyimpan dana itu dan bisa dipergunakan," jelas Andy. ***(mse)***